

# **Analisis Kesenjangan Kemakmuran Antara Cita-Cita (Tujuan Bernegara) Dan Kondisi Terkini: Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Raden Adiguna Prabowo, Irwan Taufiq Ritonga,

## **Abstrak**

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara cita-cita (tujuan bernegara) dan kondisi terkini pemda di Indonesia.

**Desain/Methodologi/Pendekatan:** Penelitian ini menggunakan Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) dan konsep solvabilitas layanan untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara cita-cita dan kondisi realita pemda di Indonesia.

**Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat gap sebesar USD-PPP7,919 per kapita antara kemakmuran dan realita; dan (2) terjadi gap 14 tahun untuk mencapai kemakmuran sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

**Orisinalitas:** Penelitian ini memberikan metoda baru untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara yang tercantum dalam konstitusi dan kondisi realita, juga kesenjangan kemakmuran antar negara.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini masih menganalisis kemakmuran secara umum, belum menganalisis kemakmuran secara spesifik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun aspek lainnya.

**Kontribusi Akademik:** Penelitian ini menawarkan metoda baru untuk mengukur kesenjangan antara cita-cita dan kondisi terkini. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas layanan per kapita berkorelasi dengan kemakmuran rakyat.

**Implikasi Praktis:** Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran (*awareness*) kepada pemerintahan di Indonesia agar melakukan revolusi kebijakan pengelolaan keuangan negara sehingga mempercepat pencapaian cita-cita yang diamanahkan oleh konstitusi.

**Kata Kunci:** *Kesenjangan kemakmuran, solvabilitas layanan, kondisi keuangan, belanja modal, pengelolaan keuangan.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dapat dipastikan bahwa mewujudkan masyarakat yang makmur merupakan salah satu tujuan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, kewajiban pemerintah untuk memakmurkan rakyat dinyatakan dalam Pembukaan UUD '45.

Manan (2004) menyatakan bahwa dalam sebuah negara, pemerintah menjadi penanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 (Manan 2004). Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat UUD 1945, dibentuklah pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial dan lain-lain).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara (Republik Indonesia 2003). Hak negara berkaitan dengan pemungutan pajak, peredaran uang, dan pelaksanaan pinjaman, sedangkan kewajiban negara berkaitan dengan penyelenggaraan layanan umum pemerintahan dan pembayaran tagihan pihak ketiga (Republik Indonesia 2003). Hak dan Kewajiban negara tersebut tertuang dalam APBN dan APBD yang disusun setiap tahun. Dengan demikian, APBN dan APBD merupakan instrumen pemerintah (pusat dan daerah) yang harus dikelola dengan baik untuk menyediakan layanan guna mencapai masyarakat yang makmur (Mardiasmo 2005, Warsame dan Ileri 2016).

Esensi dari pengelolaan anggaran (APBN/APBD) ialah pengalokasian sumber daya pada program-program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Thai 1986; Lalvani 2010; Mikesell dan Mullins 2011; Flink dan Molina 2020). Anggaran juga mencerminkan tujuan utama dari pemerintah, dalam hal ini ialah mencapai kemakmuran (Lauth 1992; Santos Ospina 2020).

Dengan diterapkannya otonomi daerah<sup>1</sup> di Indonesia, pemerintah daerah (melalui pengelolaan APBD) memiliki peran penting dalam mengembangkan kota atau daerah guna memberikan pelayanan demi mewujudkan kemakmuran masyarakat (Republik Indonesia 2014; Soares, Nurpratiwi, dan Makmur 2015; Warsame dan Ileri 2017; Sarosa 2020). Hal tersebut dikarenakan pemda memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengimplementasikan ide atau inovasi baru yang memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat (UN-Habitat 2013; Moore dan Woodcraft 2019).

*United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat) menyatakan bahwa makmur merupakan kondisi masyarakat yang inklusif serta diimbangi dengan pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan meningkatkan perlindungan lingkungan (UN-Habitat

---

<sup>1</sup> Dasar hukum penerapan otonomi daerah ialah UUD 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2; Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2013; Moore dan Woodcraft 2019). *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menjelaskan bahwa kondisi kehidupan masyarakat dalam sebuah kota dapat diukur berdasarkan lima kategori, yakni stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur, sebagaimana diungkapkan EIU (Economist 2019):

*“The concept of liveability is simple: it assesses which locations around the world provide the best or the worst living conditions .... Each city is assigned a score for over 30 qualitative and quantitative factors across five broad categories of stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure.”*

Dengan demikian, kondisi masyarakat yang makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, dapat dicerminkan melalui 10 peringkat teratas kota paling layak huni di dunia. Berdasarkan survey EIU pada tahun 2019, sepuluh kota tersebut merupakan kota yang berhasil mencapai nilai mendekati 100 (ideal). Tabel 1 di bawah ini merupakan daftar sepuluh kota paling layak huni di dunia berdasarkan survei EIU pada tahun 2019.

Tabel 1. Daftar Sepuluh Kota Paling Layak Huni di Dunia pada Tahun 2019

Peringkat	Kota	Nilai Keseluruhan (100 = ideal)	Stabilitas	Kesehatan	Budaya dan Lingkungan	Pendidikan	Infrastruktur
1	Vienna	99.1	100	100	96.3	100	100
2	Melbourne	98.4	95	100	98.6	100	100
3	Sydney	98.1	95	100	97.2	100	100
4	Osaka	97.7	100	100	93.5	100	96.4
5	Calgary	97.5	100	100	90	100	100
6	Vancouver	97.3	95	100	100	100	92.9
7	Toronto	97.2	100	100	97.2	100	89.3
8	Tokyo	97.2	100	100	94.4	100	92.9
9	Copenhagen	96.8	95	95.8	95.4	100	100
10	Adelaide	96.6	95	100	94.2	100	96.4

Sumber: *The Economist Intelligence Unit* 2019

Di sisi lain, selama ini kota di Indonesia belum mampu untuk masuk ke dalam peringkat 50 besar kota paling layak huni di dunia. Kota Jakarta yang mewakili Indonesia masih berada pada peringkat 115 dari 140 negara yang disurvei pada tahun 2019 (Economist 2019). Kondisi ini jauh tertinggal dibandingkan 10 kota paling layak huni di dunia. Hal ini berarti bahwa Indonesia masih jauh dari keadaan masyarakat yang makmur seperti cita-cita kemakmuran yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan kemakmuran yang signifikan antara kondisi pemerintah daerah di Indonesia saat ini dan cita-cita pendirian NKRI. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kesenjangan kemakmuran antara cita-cita yang tercantum dalam konstitusi dan kondisi pemda di Indonesia dari sisi pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan atas keuangan publik merupakan unsur utama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran (Jones dkk. 2020; Flink dan Molina 2020).

Penelitian ini menawarkan metoda baru untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran dengan menggunakan konsep solvabilitas layanan. Struktur penulisan dalam paper disajikan dalam lima bagian. Bagian kedua menjelaskan konsep kemakmuran, kemakmuran sebagai tujuan bernegara, dan solvabilitas layanan pemda; bagian ketiga menguraikan metode penyetaraan mata uang dengan menggunakan teori *Purchasing Power Parity* (PPP) dan metode analisis kesenjangan kemakmuran dari dua aspek, yaitu kapasitas layanan dan waktu; bagian keempat menyajikan hasil analisis dan diskusi; dan bagian kelima ialah kesimpulan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Kemakmuran**

Dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran masyarakat di suatu wilayah/negara diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*), baik dihitung dengan nilai total atau menggunakan basis per kapita (Bate 2009). Nilai GDP menggambarkan total nilai dari seluruh barang dan jasa dalam satu perekonomian wilayah/negara, sehingga makin tinggi GDP per kapita, maka makin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakat. Namun demikian, GDP memiliki kegagalan dalam hal menggambarkan unsur penting kemakmuran, misalnya kesehatan, keamanan, dan kebebasan (Bate 2009).

UN-Habitat (2013) memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam mendefinisikan kemakmuran. Kemakmuran merupakan kondisi bersama dan inklusif yang diimbangi dengan mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keberlangsungan lingkungan (UN-Habitat 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran berfokus pada kondisi kehidupan manusia (Wong 2015).

Kondisi kemakmuran masyarakat yang ideal diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek (Kumolo, Yuwono, dan Sumarwono 2017; Retnaningsih dkk. 2018), sehingga tercipta kondisi kehidupan yang nyaman (*liveable*). Artinya, kriteria dari kemakmuran ialah kondisi kehidupan masyarakat yang nyaman. Abdullah dan Kalianan (2008) juga menyatakan bahwa kenyamanan masyarakat, baik secara personal ataupun secara bersama-sama merupakan pencerminan keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan (Abdullah dan Kalianan 2008)

Banyak lembaga survei internasional yang mencoba mengukur kemakmuran berdasarkan kondisi kehidupan manusia. *The Legatum Institute* mengukur kemakmuran suatu negara menggunakan perpaduan variabel dari sisi ekonomi dan kualitas hidup (Bate 2009). *Mercer Quality of Life Index* melakukan survei terhadap kota di berbagai negara menggunakan 39 faktor yang mencerminkan nilai kualitas hidup bagi ekspatriat (orang asing) jika tinggal di kota tersebut. *The Economist Intelligence Unit* (EIU) mengukur kondisi kehidupan pada 140

kota di dunia berdasarkan 30 ukuran kuantitatif dan kualitatif dari lima kategori umum, yakni stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur (Economist 2019).

Berdasarkan survei EIU 2019, disebutkan bahwa kota – kota yang berada dalam peringkat 10 besar *the most liveable cities* memiliki pendanaan publik yang baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Economist 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku pengelola dana publik memiliki peran yang vital dalam mengembangkan kota/wilayahnya dengan menyediakan fasilitas atau layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Soares, Nurpratiwi, dan Makmur 2015; Warsame dan Ileri 2017; Sarosa 2020).

Harisalo dan McInerney (2008) juga menyebutkan bahwa penyediaan layanan publik oleh pemerintah merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan kesejahteraan (Harisalo dan McInerney 2008). Dengan demikian, dari perspektif pelayanan publik, kota yang makmur ialah kota yang mampu menyediakan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

## **2.2 Kemakmuran Masyarakat Sebagai Tujuan Bernegara**

Secara umum, negara-negara di dunia bertujuan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya (Harisalo dan McInerney 2008). Sebagai contoh, Amerika Serikat, Swedia, dan Swiss menyatakan dalam konstitusinya bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama bernegara (Amerika Serikat 1787; Swedia 1974; Swiss 1999). Begitu juga dengan tujuan bernegara di Indonesia yang dinyatakan dalam konstitusi, yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur (Republik Indonesia 1945).

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara (Republik Indonesia 2003). Untuk mencapai tujuan tersebut setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (Republik Indonesia 2003). Dengan demikian, APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara.

Tujuan utama pengelolaan anggaran yakni memastikan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada masyarakat (Lalvani 2010; Mikesell dan Mullins 2011). Pengalokasian anggaran (APBN atau APBD) yang tepat dan sesuai prioritas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kwan, Bali, dan Asher 2016; Warsame dan Ileri 2017). Tanpa pengalokasian anggaran yang baik, pemerintah akan kesulitan

dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanannya (Overmans dan Noordegraaf 2014; Rubin 2016; Flink 2018).

### **2.3 Kemakmuran Masyarakat dan Solvabilitas Layanan Pemda**

Solvabilitas layanan pemda adalah kapasitas pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas layanan publik yang diinginkan oleh masyarakat (Wang dkk. 2007). Kapasitas layanan pemda adalah seluruh sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemda yang digunakan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat (Ritonga 2014). Kapasitas pelayanan publik yang memadai di berbagai aspek pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain) akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Sanderson, 1996; Hong, 2011). Hal tersebut menjadi tolok ukur kemakmuran masyarakat (Harisalo dan McInerney 2008). Dengan demikian, tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur berdasarkan tingkat kapasitas layanan pemda.

Solvabilitas layanan pemda dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio aset tetap per kapita, yaitu total nilai buku<sup>2</sup> aset tetap dibagi dengan jumlah penduduk. Sampai saat ini belum ada ambang batas nilai yang menunjukkan seberapa baik atau buruk suatu rasio solvabilitas layanan. Namun demikian, secara umum, semakin tinggi rasio solvabilitas layanan pemda, maka semakin tinggi pula kapasitas pemda dalam melayani warganya (Ritonga 2014).

Aset tetap merupakan indikator kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat (Singla dkk. 2018). Aset tetap pemerintah terwujud dalam fasilitas-fasilitas publik yang digunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti bangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pasar, taman kota dan transportasi umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset tetap merepresentasikan investasi dana publik yang dikelola pemda untuk melayani masyarakat (Rivenbark 2000). Semakin tinggi nilai aset tetap, semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini ialah Metropolitan<sup>3</sup> Jakarta (selanjutnya disebut Kota Jakarta) dan Metropolitan Melbourne (selanjutnya disebut Kota Melbourne). Kota Jakarta

---

<sup>2</sup> Nilai buku dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan (Republik Indonesia 2010)

<sup>3</sup> Metropolitan didefinisikan sebagai suatu pusat permukiman yang besar yang terdiri dari satu kota besar dan beberapa kawasan yang berada di sekitarnya dengan satu atau lebih kota besar melayani sebagai titik hubung (*hub*) dengan kota-kota sekitarnya tersebut. Secara umum, kota Metropolitan memiliki konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu dan mencirikan aktivitas kota (Dardak, A. Hermanto, dkk. 2006).

merepresentasikan kondisi kemakmuran Indonesia saat ini, sedangkan Kota Melbourne merepresentasikan cita-cita makmur sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Peneliti memilih Kota Melbourne sebagai representasi cita-cita makmur sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia karena Kota Melbourne selalu berada dalam 10 besar *the most liveable cities in the world*. Kota Melbourne menduduki peringkat pertama *the most liveable cities in the world* selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2017, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 menduduki peringkat kedua (*Economist* 2019).

Peneliti memilih Kota Jakarta sebagai representasi kondisi kemakmuran Indonesia saat ini berdasarkan tiga alasan. Alasan yang utama yaitu Kota Jakarta memiliki kesetaraan dengan Kota Melbourne dari segi kompleksitas lingkungannya, seperti jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Alasan yang kedua ialah Kota Jakarta masuk dalam berbagai survei internasional, seperti YouGov (survey institusi asal Inggris), *the Economist Intelligence Unit* (EIU), *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Mercer, dan lain-lain. Artinya Kota Jakarta sudah diakui oleh dunia internasional sebagai representasi Indonesia. Alasan yang termutakhir ialah Kota Jakarta mewakili Indonesia dalam pertemuan kota-kota dunia (*C40 Cities*<sup>4</sup>) yang diselenggarakan oleh PBB. Meskipun demikian, Kota Jakarta tidak dapat mewakili seluruh pemerintah daerah di Indonesia, karena ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia masih tinggi (Ilham dan Pangaribowo 2018; Sukwika 2018).

Kota Jakarta dikelola secara otonom oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbagi dalam lima wilayah administrasi kotamadya, sementara itu Kota Melbourne terdiri dari 31 *local government* (LG)<sup>5</sup>. Dengan demikian, kondisi keuangan Kota Jakarta tergambarkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kota Jakarta, sedangkan kondisi keuangan Kota Melbourne tergambarkan dalam Laporan Kombinasi LG di wilayah Kota Metropolitan Melbourne.

### **3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk mengukur kemakmuran Kota Jakarta peneliti menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2017 – 2019<sup>6</sup> yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data jumlah penduduk tahun 2017 – 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

---

<sup>4</sup> *C40 Cities* merupakan jaringan yang menghubungkan 97 kota besar dunia yang berkomitmen mengambil langkah-langkah progresif terkait perubahan iklim, untuk masa depan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. C40 mewakili lebih dari 700 juta warga di dunia dan seperempat ekonomi global (c40.org 2020).

<sup>5</sup> lihat [liveinmelbourne.vic.gov.au/discover/melbourne-victoria/metropolitan-melbourne](https://liveinmelbourne.vic.gov.au/discover/melbourne-victoria/metropolitan-melbourne)

<sup>6</sup> Kami tidak menggunakan data tahun 2020 karena pada saat penelitian ini dilakukan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020 belum selesai diaudit.

Indonesia. Data laporan keuangan ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sedangkan data jumlah penduduk didapatkan melalui laman resmi BPS Indonesia.

Untuk mengukur kemakmuran Kota Melbourne peneliti menggunakan data laporan keuangan LG periode Tahun 2016/17 – 2018/19 di wilayah Kota Melbourne yang telah diaudit oleh *Victorian Auditor-General's Office* (VAGO) dan data jumlah penduduk tahun 2017 – 2019 yang bersumber dari *Australian Bureau of Statistics*. Data laporan keuangan ini diperoleh dengan mengunduh langsung dari laman resmi masing-masing LG. Dari 31 data laporan keuangan LG, terdapat 1 LG yang tidak dapat diperoleh datanya karena tidak tersedia di laman resmi LG tersebut, sehingga hanya 30 LG yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data jumlah penduduk tersedia dalam laman resmi Biro Statistik Australia.

Untuk menyetarakan nilai mata uang antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne peneliti menggunakan data Indeks Big Mac yang diterbitkan oleh *the Economist* secara berkala sejak tahun 1984. Data indeks Big Mac tersedia dalam laman resmi *the Economist* (lihat [www.economist.com/big-mac-index](http://www.economist.com/big-mac-index)).

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Terdapat tiga tahapan utama dalam melakukan analisis data, yaitu (1) melakukan penyetaraan kondisi perekonomian antara Kota Melbourne dan Kota Jakarta dengan menyetarakan nilai mata uang; (2) menganalisis kesenjangan kemakmuran dari aspek solvabilitas layanan; dan (3) menganalisis kesenjangan kemakmuran dari aspek waktu, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

#### **3.3.1 Tahap I: Menyetaraan Kondisi Perekonomian**

Peneliti melakukan penyetaraan kondisi perekonomian dengan menggunakan Teori *Purchasing Power Parity* (PPP)<sup>7</sup>. Penyetaraan kondisi perekonomian tersebut juga dilakukan oleh *World Bank* dalam membandingkan *gross domestic product* (GDP) dan *expenditure per capita* antar negara (World Bank 2020). Penyetaraan kondisi perekonomian ini berguna agar informasi keuangan antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne dapat diperbandingkan secara

---

<sup>7</sup> Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) digunakan untuk menghitung penyetaraan mata uang, teori ini menyatakan bahwa tingkat nilai tukar mata uang proporsional jika dibandingkan tingkat harga komoditas di dua negara yang diperbandingkan (Clements, Lan, dan Seah 2010). Teori PPP mengasumsikan bahwa dalam suatu kondisi (misalnya dalam jangka panjang) jumlah biaya yang dikeluarkan akan sama dalam mata uang apapun untuk membeli satu komoditas. Peneliti menggunakan komoditas BigMac yang diproduksi oleh gerai McDonald's di hampir seluruh dunia. Secara sederhana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli satu Big Mac di seluruh dunia seharusnya sama (The Economist 1984).



obyektif karena keduanya menyajikan informasi keuangan dalam mata uang berbeda (Rupiah/IDR dan Dollar Australia/AUD).

Terdapat tiga langkah yang dilakukan untuk menyetarakan kondisi perekonomian nilai mata uang antara kedua negara. Langkah pertama yakni mengumpulkan data indeks Big Mac periode tahun 2017 – 2020 yang diperoleh dari laman resmi the Economist. Data indeks Big Mac tersebut terdiri atas: (1) data harga BigMac di Indonesia dan Australia (dalam kurs lokal masing-masing negara); (2) data harga Big Mac di Amerika Serikat (dalam kurs USD); (3) data nilai tukar kurs USD ke IDR; dan (4) data nilai tukar kurs USD ke AUD. Data tersebut disajikan dalam format tabel 3.

Langkah kedua yaitu mengkonversikan harga Big Mac di Indonesia dan Australia dari kurs lokal masing-masing negara ke kurs USD. Hal tersebut dilakukan dengan cara membagi harga Big Mac di Indonesia dan Australia dengan nilai tukar kurs USD untuk masing-masing negara (kolom H dan I).

Langkah ketiga, ialah menghitung *rate adjustment*, yaitu penyetara dari kurs USD menjadi kurs USD-PPP dengan menggunakan harga Big Mac di Indonesia dan Australia (dalam kurs USD). *Rate adjustment* di Indonesia dihitung dengan membagi harga Big Mac di Amerika dengan harga Big Mac di Indonesia dalam kurs USD. *Rate adjustment* di Australia juga dihitung dengan cara yang sama.

Tabel 3 Format Penyetaraan Indeks Harga BigMac USD ke USD PPP

No	Date	BigMac Price			Currency Rate		BigMac Price (USD)		Rate adjustment	
		IDN	AU	US	USD to IDR	USD to AUD	IDN	AU	IDN	AU
A	B	C	D	E	F	G	H = C/F	I = D/G	J = E/H	K = E/I
1.	Januari 20X0	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.	Juli 20X0	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3.	Januari 20X1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	Juli 20X1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
...	...									

### 3.3.2 Tahap II: Menganalisis Kesenjangan Kemakmuran dari Aspek Kapasitas Layanan

Peneliti menganalisis kesenjangan kemakmuran antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne dengan melihat selisih antara rasio aset tetap per kapita Kota Melbourne dan Kota Jakarta. Terdapat empat langkah yang dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran pada tahapan ini.

Langkah pertama, mengkonversi nilai aset tetap yang tersaji pada laporan keuangan masing-masing negara ke kurs USD, sehingga nilai aset tetap tersaji dalam kurs USD. Langkah kedua, mengkonversi nilai aset tetap dalam kurs USD menggunakan indeks harga Big Mac (*rate adjustment*), sehingga nilai aset tetap tersaji dalam kurs USD-PPP. Langkah ketiga, menghitung solvabilitas layanan Kota Jakarta dan Kota Melbourne dengan membagi nilai aset

tetap yang tersaji dalam kurs USD-PPP dengan jumlah penduduk. Langkah keempat, menghitung selisih antara rasio aset tetap Kota Melbourne dan Kota Jakarta untuk mengukur kesenjangan kemakmuran dari aspek solvabilitas layanan.

### 3.3.3 Tahap III: Menganalisis Kesenjangan Kemakmuran dari Aspek Waktu

Kesenjangan kemakmuran dari aspek waktu dianalisis dengan cara menghitung berapa lama waktu yang diperlukan oleh Kota Jakarta agar rasio solvabilitas layanannya menjadi sama dengan rasio solvabilitas layanan yang dimiliki oleh Kota Melbourne. Asumsi yang mendasari analisis ini ialah (1) kualitas belanja Kota Jakarta dan Kota Melbourne ialah konstan dari waktu ke waktu; dan (2) kebijakan pengelolaan keuangan Kota Jakarta dan Kota Melbourne ialah konstan.

Dalam menganalisis kesenjangan dari aspek waktu, diperlukan perhitungan rata-rata pertumbuhan aset tetap dan jumlah penduduk. Rata-rata pertumbuhan aset tetap (dalam persentase) dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik pertumbuhan aset tetap selama jumlah tahun yang diteliti. Pertumbuhan aset tetap dihitung dengan mengurangi nilai aset tetap di tahun ke-n dengan tahun ke-(n-1), membaginya dengan nilai aset tetap di tahun ke-(n-1), lalu dikalikan dengan 100%. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk juga dihitung dengan cara yang sama.

Selanjutnya hasil perhitungan proyeksi aset tetap dan jumlah penduduk disajikan dalam format tabel di bawah ini. Rasio aset tetap per kapita setiap tahunnya dihitung dengan rumus proyeksi aset tetap tahun (n) dibagi dengan proyeksi jumlah penduduk tahun (n). Kesenjangan kemakmuran dari aspek waktu adalah selisih antara tahun tercapainya rasio target dengan tahun dasar (2020).

Tahun	Proyeksi Aset Tetap	Proyeksi Jumlah Penduduk	Rasio Aset Tetap per Kapita
2020	XXX	XXX	XXX
2021	XXX	XXX	XXX
2022	XXX	XXX	XXX
...	...	...	...
20XX	XXX	XXX	YYY*

\*Rasio target yang harus dicapai = rasio milik Kota Melbourne

## 4. Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan hasil analisis yang terdiri dari: (1) penyetaraan kondisi perekonomian; (2) analisis kesenjangan kemakmuran dari aspek kapasitas layanan; dan (3) analisis kesenjangan kemakmuran dari aspek waktu.

### 4.1 Menyetarakan Kondisi Perekonomian

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan proses penyetaraan kondisi perekonomian antara Indonesia dan Australia. Perbandingan harga BigMac antara Indonesia dan Australia dalam kurs USD dapat dilihat pada kolom H dan I.

Selanjutnya nilai *rate adjustment* untuk Indonesia dan Australia dihitung dengan cara membagi harga BigMac di Amerika Serikat dengan harga BigMac di Indonesia dan Australia yang sudah dikonversi ke kurs USD (lihat kolom H dan I). *Rate adjustment* berfungsi untuk menyetarakan kurs Indonesia dan Australia, sehingga kedua negara diasumsikan memiliki kondisi perekonomian yang setara dan dapat diperbandingkan (Pakko dan Pollard 2003, World Bank 2020).

Tabel 4.1 Penyetaraan Indeks Harga BigMac USD ke USD PPP

No	Date	Big Mac Price			Currency Rate		Big Mac Price (USD)		Rate Adjustment	
		Indonesia (IDR)	Australia (AUD)	U.S. (USD)	USD to IDR	USD to AUD	Indonesia	Australia	Indonesia	Australia
A	B	C	D	E	F	G	H = C/F	I = D/G	J = E/H	K = E/I
1	Januari 2015	27,939.00	5.30	4.79	12,480.00	1.23	2.24	4.31	2.14	1.11
2	Juli 2015	30,500.00	5.30	4.79	13,344.50	1.35	2.29	3.93	2.10	1.22
3	Januari 2016	30,500.00	5.30	4.93	13,947.50	1.42	2.19	3.73	2.25	1.32
4	Juli 2016	31,000.00	5.75	5.04	13,112.50	1.34	2.36	4.29	2.13	1.17
5	Januari 2017	31,000.00	5.80	5.06	13,329.00	1.36	2.33	4.26	2.18	1.19
6	Juli 2017	32,126.00	5.90	5.30	13,369.50	1.36	2.40	4.34	2.21	1.22
7	Januari 2018	35,750.00	5.90	5.28	13,359.00	1.25	2.68	4.72	1.97	1.12
8	Juli 2018	31,500.00	6.05	5.51	14,360.00	1.34	2.19	4.51	2.51	1.22
9	Januari 2019	33,000.00	6.10	5.58	14,090.00	1.40	2.34	4.36	2.38	1.28
10	Juli 2019	32,000.00	6.15	5.74	14,130.00	1.44	2.26	4.27	2.53	1.34
11	Januari 2020	33,000.00	6.45	5.67	13,670.00	1.45	2.41	4.45	2.35	1.27
12	Juli 2020	34,000.00	6.55	5.71	14,435.00	1.43	2.36	4.58	2.42	1.25

Sumber: *The Economist: The Big Mac Index* tahun 2015 – 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa *rate adjustment* di Indonesia rata-rata 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Australia. Hal tersebut menunjukkan bahwa, untuk harga satu komoditas yang sama pada Januari 2015, masyarakat Indonesia perlu mengeluarkan biaya 2.14 kali lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Amerika Serikat, sedangkan masyarakat Australia hanya mengeluarkan biaya 1.11 kali lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan daya beli masyarakat Australia.

#### 4.2 Analisis Kesenjangan Kemakmuran dari Aspek Kapasitas Layanan

Dalam menganalisis kesenjangan kemakmuran dari aspek kapasitas layanan antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu (1) menyetarakan nilai aset tetap Kota Jakarta dan Kota Melbourne ke kurs USD-PPP menggunakan *rate adjustment* yang diperoleh pada bagian sebelumnya; dan (2) menghitung selisih kapasitas layanan antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne berdasarkan rasio solvabilitas layanan.

Tabel 4.3 dan 4.4 di bawah ini menunjukkan proses konversi nilai aset tetap Kota Jakarta dan Kota Melbourne dari nilai-nilai setempat ke kurs USD dan USD PPP.

Tabel 4.3 Konversi Nilai Aset Tetap Jakarta dan Melbourne ke Mata Uang USD

Tahun	Nilai Buku Aset Tetap		Kurs ke USD		Nilai Buku Aset Tetap (USD)	
	Jakarta (IDR)	Melbourne (AUD)	Jakarta	Melbourne	Jakarta	Melbourne
2017	353,005,073,768,652	66,171,463,000	13,359	1.36	26,424,513,344	48,655,487,500
2018	384,807,313,577,940	74,439,575,000	14,090	1.34	27,310,668,103	55,551,922,388
2019	403,450,885,984,552	75,134,058,000	13,670	1.44	29,513,598,097	52,176,429,861

Tabel 4.4 Konversi Nilai Aset Tetap Jakarta dan Melbourne dari Mata Uang USD ke Mata Uang USD PPP

Tahun	Nilai Buku Aset Tetap (USD)		Rate adjustment ke USD PPP		Nilai Buku Aset Tetap (USD PPP)	
	Jakarta	Melbourne	Jakarta (Januari)	Melbourne (Juli)	Jakarta	Melbourne
2017	26,424,513,344	48,655,487,500	1.97	1.22	52,136,133,972	59,442,161,678
2018	27,310,668,103	55,551,922,388	2.38	1.22	65,067,418,478	67,795,382,440
2019	29,513,598,097	52,176,429,861	2.35	1.34	69,320,197,683	70,125,121,733

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai aset tetap antara Kota Jakarta dan Kota Melbourne setelah dikonversikan ke kurs USD-PPP ternyata memiliki nilai yang tidak berbeda jauh. Misalnya, pada tahun 2019, nilai aset tetap Kota Jakarta ialah sebesar USD-PPP 69,320,197,683 sedangkan Kota Melbourne ialah sebesar USD-PPP 70,125,121,733, hanya terdapat selisih USD-PPP 804,924,050 ( $70,125,121,733 - 69,320,197,683$ ) atau sebesar 1.14% dari nilai buku aset tetap Kota Melbourne.

Kesenjangan kemakmuran dihitung dari selisih antara aset tetap per kapita Kota Melbourne dan Kota Jakarta. Nilai aset tetap per kapita Kota Melbourne dan Kota Jakarta dan kesenjangan kemakmuran antara Kota Melbourne dan Kota Jakarta ditampilkan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Rasio Aset Tetap per Kapita Kota Melbourne dan Jakarta

No	Kota	Aset Tetap (USD PPP)			Penduduk			Rasio Aset Tetap per Kapita		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Melbourne	59.442.161.678	67.795.382.440	70.125.121.733	4.574.829	4.708.144	4.841.328	12.993	14.400	14.485
2	Jakarta	52.136.133.972	65.067.418.478	69.320.197.683	10.322.777	10.467.629	10.557.810	5.051	6.216	6.566
Kesenjangan Kemakmuran								7.943	8.184	7.919

Tabel 4.5 atas menunjukkan bahwa Kota Melbourne memiliki kapasitas layanan yang jauh lebih besar dibandingkan Kota Jakarta, yaitu lebih dari dua kali lipat. Artinya, Kota Melbourne mampu memberikan layanan kepada penduduknya dengan kuantitas dan kualitas dua kali lipat lebih baik dibandingkan Kota Jakarta yang berakibat pada kemakmuran dan kenyamanan yang lebih baik. Kondisi inilah yang menjadi penyebab kesenjangan kemakmuran yang dialami oleh Pemda di Indonesia saat ini.

Secara sederhana, idealnya jika satu fasilitas umum di Australia dapat dinikmati oleh satu orang per fasilitas, namun di Indonesia (untuk fasilitas yang setara) harus dinikmati oleh

lebih dari dua orang per fasilitas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas layanan per penduduk mempengaruhi kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, gap kemakmuran yang terjadi di Indonesia dapat dipersempit dengan dua cara. Pertama, pemda meningkatkan kapasitas aset tetap, antara lain dengan cara: (1) meningkatkan alokasi belanja modal untuk mengakselerasi pertumbuhan aset tetap; dan (2) memastikan alokasi belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kapasitas aset tetap yang sudah ada.

Kedua, pemerintah diharapkan agar dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan ukuran dari permintaan atas layanan pemerintah (Narbón-Perpiñá 2018). Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang akan meningkatkan permintaan atas layanan pemerintah, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, apabila kapasitas pemda dalam menyediakan layanan ialah tetap, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi kesenjangan kemakmuran terjadi, begitu pula sebaliknya.

#### 4.3 Analisis Kesenjangan Kemakmuran dari Aspek Waktu

Bagian ini menganalisis berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Kota Jakarta agar rasio solvabilitas layanannya dapat menyamai Kota Melbourne, yaitu sebesar USD-PPP14,485 per kapita. Analisis kesenjangan waktu ini diharapkan dapat memberikan gambaran intensitas keparahan terhadap kesenjangan kemakmuran yang terjadi.

Pertumbuhan aset tetap dan penduduk Kota Jakarta ditampilkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pertumbuhan Aset Tetap dan Penduduk Kota Jakarta

No	Nilai (USD-PPP)	Tahun			Rata-rata <i>Growth</i>
		2017	2018	2019	
1.	Aset Tetap	52,136,133,972	65,067,418,478	69,320,197,683	7.57%
2.	Penduduk	10,322,777	10,467,629	10,557,810	1.23%

Selanjutnya, diasumsikan pertumbuhan aset tetap dan penduduk kota Jakarta ialah konstan, yaitu 7,57% dan 1,23% per tahun. Angka pertumbuhan ini akan digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan aset tetap. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7 di bawah ini, Kota Jakarta dapat mencapai target aset tetap per kapita pada tahun 2033 dengan nilai aset tetap per kapita Kota Jakarta sebesar USD-PPP15,362 per kapita. Dengan demikian, kondisi makmur di Indonesia saat ini masih tertinggal 14 tahun (2033 – 2019) dari cita-cita yang tercantum dalam konstitusi. Dengan kata lain, kondisi Kota Jakarta di tahun 2019 setara dengan kondisi Kota Melbourne di tahun 2005.

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Aset Tetap per Kapita Kota Jakarta

Tahun	Proyeksi Aset Tetap dengan <i>growth</i> 7.57% (USD-PPP)	Proyeksi Jumlah Penduduk dengan <i>growth</i> 1.23%	Rasio Aset Tetap per Kapita (USD-PPP per kapita)
2019*	69,320,197,653	10,557,810	6,556
2020	74,564,902,205	10,687,599	6,977
2021	80,206,545,487	10,818,984	7,414
.....	.....	.....	.....
2032	178,910,123,855	12,375,306	14,457
2033	192,446,459,607	12,527,438	15,362
2034	207,006,954,202	12,681,440	16,324

\*Tahun dasar

Ketertinggalan 14 tahun ini menunjukkan kesenjangan kemakmuran yang signifikan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut diperlukan tiga kali pergantian presiden di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya kesenjangan yang terjadi antara cita-cita dan realita di Indonesia.

### 5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan kemakmuran yang signifikan di Indonesia antara kondisi saat ini dan cita-cita (tujuan bernegara). Hal ini ditunjukkan dengan gap ketertinggalan selama 14 tahun dan kapasitas layanan pemda yang hanya separuh dari yang seharusnya. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas layanan per kapita berkorelasi dengan kemakmuran rakyat

Hasil penelitian ini diharapkan membangun kesadaran (*awareness*) pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar melakukan revolusi kebijakan pengelolaan keuangan negara sehingga mempercepat pencapaian kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan metode analisis kesenjangan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menggunakan solvabilitas layanan secara umum untuk mengukur kemakmuran masyarakat, yaitu total aset tetap pemerintah dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti sebaiknya dapat menggunakan rasio solvabilitas layanan yang lebih spesifik, seperti solvabilitas layanan pendidikan, solvabilitas layanan kesehatan, ataupun solvabilitas infrastruktur. Hal tersebut dapat meningkatkan akurasi analisis kesenjangan kemakmuran.

Kedua, asumsi pertumbuhan aset tetap dan penduduk dalam penelitian ini ialah konstan untuk horizon waktu yang panjang. Dalam rentang waktu panjang (misal lebih dari 5 tahun), rasio pertumbuhan aset tetap dan jumlah penduduk kemungkinan besar tidaklah konstan.

Ketiga, Kota Jakarta belum dapat mewakili seluruh pemerintah daerah di Indonesia, karena ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia cukup tinggi (Ilham dan Pangaribowo 2018; Sukwika 2018). Namun demikian, dalam penelitian ini, Kota Jakarta dianggap sebagai representasi terbaik Indonesia yang dapat diperbandingkan secara setara dengan Kota Melbourne.

## 6. Referensi

- Abdullah, Hazman Shah, and Maniam Kalianan. 2009. "From Customer Satisfaction to Citizen Satisfaction: Rethinking Local Government Service Delivery in Malaysia." *Asian Social Science* 4 (11): p87. <https://doi.org/10.5539/ass.v4n11p87>.
- Bate, Roger. 2009. "What Is Prosperity and How Do We Measure It?" *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2342844>.
- Clements, Kenneth W., Yihui Lan, and Shi Pei Seah. 2010. "The Big Max Index Two Decades on an Evaluation of Burgernomics." *Business School The University of Western Australia*, 103. <https://doi.org/10.1002/ijfe.432>.
- Dardak, A. Hermanto, Setia Budi Algamar, Poernomosidhi, and Iman Soedrajat, eds. 2006. *Metropolitan di Indonesia: kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang*. Cet. 1. Kebayoran Baru, Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Economist, The. 2019. "The Global Liveability Index 2019: A Free Overview."
- Flink, Carla M. 2017. "Ordering Chaos: The Performance Consequences of Budgetary Changes." *American Review of Public Administration*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/0275074016687072>.
- Flink, Carla, and Angel Luis Molina. 2020. "Improving the Performance of Public Organizations: Financial Resources and the Conditioning Effect of Clientele Context." *Public Administration*, September, padm.12690. <https://doi.org/10.1111/padm.12690>.
- Harisalo, Risto, and John McInerney. 2008. "Welfare State: From Dream to Reality." *International Journal of Public Administration* 31 (10–11): 1303–26. <https://doi.org/10.1080/01900690801973501>.
- Jones, Aled, Nick Taylor, Sarah Hafner, and Joanna Kitchen. 2020. "Finance for a Future of Sustainable Prosperity." *Area*, June, area.12631. <https://doi.org/10.1111/area.12631>.
- Kingdom of Sweden. 1974. "Sweden's Constitution of 1974 with Amendments through 2012."
- Kumolo, Tjahjo, Sony Yuwono, and Rudiarto Sumarwono. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Kwan, Chang Yee, Azad Singh Bali, and Mukul G. Asher. 2016. "Organization and Reporting of Public Financial Accounts: Insights and Policy Implications from the Singapore Budget: Organization and Reporting of Public Financial Accounts." *Australian Journal of Public Administration* 75 (4): 409–23. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12228>.
- Lalvani, Mala. 2010. "Public Expenditure Management Reform in India via Intergovernmental Transfers: Public Expenditure Management Reform in India." *Public Budgeting & Finance* 30 (3): 98–133. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2010.00964.x>.
- Lauth, Thomas P. 1992. "State Budgeting: Current Conditions and Future Trends." *International Journal of Public Administration* 15 (5): 1067–96. <https://doi.org/10.1080/01900699208524750>.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mikesell, John L., and Daniel R. Mullins. 2011. "Reforms for Improved Efficiency in Public Budgeting and Finance: Improvements, Disappointments, and Work-in-Progress: Reforms for Improved Efficiency in Public Budgeting and Finance." *Public Budgeting & Finance* 31 (4): 1–30. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2011.00998.x>.
- Moore, Henrietta L., and Saffron Woodcraft. 2019. "Understanding Prosperity in East London: Local Meanings and 'Sticky' Measures of the Good Life." *City & Society* 31 (2): 275–98. <https://doi.org/10.1111/ciso.12208>.
- Narbón-Perpiñá, Isabel, and Kristof De Witte. 2017. *International Transactions in Operational Research* 00: 1–38. <https://doi.org/10.1111/itor.12364>.
- Overmans, J. F. A. (Tom), and Mirko Noordegraaf. 2014. "Managing Austerity: Rhetorical and Real Responses to Fiscal Stress in Local Government." *Public Money & Management* 34 (2): 99–106. <https://doi.org/10.1080/09540962.2014.887517>.
- Pakko, Michael R., and Patricia S. Pollard. 2003. "Burgernomics: A Big Mac™ Guide to Purchasing Power Parity." *Review* 85 (6). <https://doi.org/10.20955/r.85.9-28>.
- Pangaribowo, Evita Hanie. 2018. "Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 – 2015." *Gadjah Mada University*, 10.
- Republic of Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- . 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara."
- . 2010. "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan."
- . 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Retnaningsih, Hartini, Tri Rini Puji Lestari, Ani Sri Suryani, Ujianto Singgih Prayitno, Sulis Winurini, Dinar Wahyuni, Achmad Muchadam Fahham, and Fieka Nurul Arifa. 2018.



*Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Daerah Kepulauan: Perspektif Kesejahteraan Sosial.*

- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. "Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia." In *4th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2014)*, 81–90. Global Science & Technology Forum (GSTF). [https://doi.org/10.5176/2251-1997\\_AF14.60](https://doi.org/10.5176/2251-1997_AF14.60).
- Rivenbark, William C. 2000. "Managing and Accounting for Fixed Assets." *Popular Government* Spring 2000: 35–38.
- Rubin, Irene S. 2016. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. CQ Press.
- Sanderson, Ian. 1996. "Evaluation, Learning and the Effectiveness of Public Services." *International Journal of Public Sector Management* 9 (5/6): 90–108. <https://doi.org/10.1108/09513559610146375>.
- Santos Ospina, Andrés Camilo. 2020. "New Development: Budgetary Accounting in Colombia—Arguments for a Much-Needed Reform." *Public Money & Management* 40 (7): 523–26. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1766793>.
- Sarosa, Wicaksono. 2020. *Kota Untuk Semua*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Singla, Akheil, Justin M. Stritch, and Mary K. Feeney. 2018. "Constrained or Creative? Changes in Financial Condition and Entrepreneurial Orientation in Public Organizations." *Public Administration* 96 (4): 769–86. <https://doi.org/10.1111/padm.12540>.
- Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M Makmur. 2015. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4 (2): 231–36. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102>.
- Sukwika, Tatan. 2018. "Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia." *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN* 6 (2): 115–30. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.
- Swiss Confederation, The. 1999. "Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments through 2002."
- Thai, Khi V. 1986. "Public Budgeting and Financial Management Curriculum Reform: A Conceptual Framework." *International Journal of Public Administration* 8 (3): 315–35. <https://doi.org/10.1080/01900698608524520>.
- UN-Habitat, ed. 2013. *Prosperity of Cities*. The State of the World's Cities 2012/2013. New York, NY: Routledge [u.a.].
- United States of America. 1787. "The Constitution of the United States."
- Wang, Xiaohu, Lynda Dennis, and Yuan Sen (Jeff) Tu. 2007. "Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States." *Public Budgeting & Finance* 27 (2): 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>.

- Warsame, Mohammed Hersi, and Edward Mugambi Ireri. 2017. "Public Finance Management Reforms in Somalia: A Case Study on Somalia's Finance Professionals: Somalia Public Finance Management Reform." *Journal of Public Affairs* 17 (3): e1621. <https://doi.org/10.1002/pa.1621>.
- Wong, Cecilia. 2015. "A Framework for 'City Prosperity Index': Linking Indicators, Analysis and Policy." *Habitat International* 45 (January): 3–9. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.018>.
- World Bank. 2020. "Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the 2017 International Comparison Program.," 227. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1530-0>.